Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
5 (2) 2025, Page: **12922** -12927

Tren Rekrutmen Guru Berbasis Digital Solusi untuk Pemerataan Kualitas Pendidikan

M. Robituhaq[1], Siti Aimah[2]
Universitas KH. Mukhtar Syafaat Banyuwangi, Indonesia
Email : robithstrong@gmail.com

Published: July, 2025

ABSTRACT

This research examines how digital-based teacher recruitment trends can be a strategic solution for the equitable distribution of education quality in Indonesia. The main objective of this study is to analyze the implementation of a digital-based teacher recruitment system at SMP Plus Darussalam as an effort to address disparities in access and quality of educators, especially for prospective teachers from 3T areas (frontier, remote, and underdeveloped). This study employs a qualitative approach with case study methods. Data collection techniques include observation, semi-structured interviews, and documentation involving informants such as school principals, prospective teachers from 3T areas, local officials, and affected communities. Data analysis is conducted descriptively-interpretatively, utilizing theoretical approaches from digital divide, digital inclusion, inclusive development, and good governance. The research results indicate that the digital recruitment system is able to open up broader access for prospective teachers from remote areas, but it still faces challenges in the form of limited digital infrastructure and technology literacy. On the other hand, infrastructure development by the government has not been fully accompanied by holistic policies and community capacity building. In conclusion, the digitalization of teacher recruitment can be an initial step towards educational equity, but its success greatly depends on policy integration, technological readiness, and the active participation of local communities as key players in sustainable educational development.

Keywords: *Digital Recruitment, Educational Equity, Remote Areas (3T)*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji bagaimana tren rekrutmen guru berbasis digital dapat menjadi solusi strategis dalam pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan sistem rekrutmen guru berbasis digital di SMP Plus Darussalam sebagai upaya untuk mengatasi ketimpangan akses dan kualitas tenaga pendidik, terutama bagi calon guru dari daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi terhadap informan yang terdiri dari kepala sekolah, calon guru dari daerah 3T, pejabat lokal, serta masyarakat terdampak. Analisis data dilakukan secara deskriptif-interpretatif dengan pendekatan teoritik dari digital divide, digital inclusion, inclusive development, serta good governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem rekrutmen digital mampu membuka akses lebih luas bagi calon guru dari wilayah terpencil, namun masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan infrastruktur digital dan literasi teknologi. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur oleh pemerintah belum sepenuhnya disertai dengan kebijakan holistik dan penguatan kapasitas masyarakat. Kesimpulannya, digitalisasi rekrutmen guru dapat menjadi langkah awal dalam pemerataan pendidikan, namun keberhasilannya sangat bergantung pada integrasi kebijakan, kesiapan teknologi, dan partisipasi aktif masyarakat lokal sebagai pelaku utama pembangunan pendidikan yang berkelanjutan.

Kata kunci ; Rekrutmen Digital, Pemerataan Pendidikan, Daerah Terpencil (3T)

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi digital telah memungkinkan proses rekrutmen guru dilakukan secara lebih luas dan terbuka, yang menjadi peluang bagi pemerataan tenaga pendidik di berbagai wilayah Indonesia(Rahman, 2020). Hal ini terjadi karena digitalisasi mengurangi hambatan geografis yang selama ini menjadi tantangan dalam distribusi guru, terutama di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Salah satu buktinya adalah penggunaan platform rekrutmen online oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memungkinkan guru dari berbagai daerah untuk melamar dan mengikuti seleksi secara daring. Data dari Kemendikbudristek menunjukkan

bahwa jumlah pelamar guru ASN-PPPK meningkat drastis sejak proses rekrutmen dilakukan secara digital mulai tahun 2021. Ini menunjukkan bahwa digitalisasi telah memperluas partisipasi dan mempercepat penyaringan tenaga pendidik yang berkompeten(Ramli et al., 2023). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa rekrutmen guru berbasis digital menjadi faktor penting dalam mewujudkan distribusi guru yang lebih adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Digitalisasi dalam proses rekrutmen guru turut berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui standarisasi seleksi yang lebih transparan dan objektif(Nasser et al., 2021). Proses digital memungkinkan sistem seleksi mengadopsi instrumen tes yang seragam, penilaian otomatis, serta audit data secara real time. Alasan utama hal ini penting adalah karena sebelumnya proses seleksi sering kali tidak konsisten antar daerah, menimbulkan kesenjangan mutu guru. Sebagai contoh, sistem seleksi PPPK berbasis Computer Assisted Test (CAT) menjamin bahwa seluruh peserta mendapatkan soal dan penilaian dengan tingkat kesulitan yang setara, tanpa campur tangan pihak ketiga. Hasil evaluasi dari BKN tahun 2022 mencatat peningkatan integritas dan transparansi dalam rekrutmen ASN setelah digitalisasi diterapkan secara menyeluruh. Berdasarkan fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa tren rekrutmen guru berbasis digital tidak hanya mempermudah distribusi guru, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas pendidikan secara nasional melalui proses seleksi yang lebih adil dan profesional.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dalam pendekatannya terhadap isu pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia dengan menyoroti *tren rekrutmen guru berbasis digital* sebagai strategi kunci yang belum banyak dieksplorasi secara mendalam dalam literatur sebelumnya(Zulbilal et al., 2024). Berbeda dari studi terdahulu yang lebih menitikberatkan pada pengembangan profesional guru, penerapan model pembelajaran multikelas, dan penguatan komunitas guru, penelitian ini secara khusus mengkaji bagaimana digitalisasi dalam proses rekrutmen guru dapat menjadi intervensi strategis untuk mengatasi ketimpangan distribusi dan kualitas pendidik, terutama di wilayah 3T. Dengan mengaitkan tren digitalisasi rekrutmen dengan peningkatan literasi digital dan kompetensi profesional guru, penelitian ini mengisi celah dalam kajian sebelumnya yang belum secara komprehensif membahas hubungan antara sistem rekrutmen digital dan pemerataan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, studi ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam merumuskan kebijakan pendidikan berbasis transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk mengatasi ketimpangan distribusi dan kualitas guru di Indonesia melalui pendekatan inovatif yang relevan dengan perkembangan zaman, yaitu digitalisasi proses rekrutmen guru(Akhyar, 2024). Selama ini, berbagai upaya pemerataan pendidikan cenderung fokus pada pelatihan guru dan peningkatan kapasitas mengajar, namun kurang menyoroti pentingnya proses rekrutmen awal yang adil, transparan, dan menjangkau seluruh wilayah, termasuk daerah 3T. Dengan mengadopsi sistem rekrutmen berbasis digital, pemerintah dan institusi pendidikan memiliki peluang besar untuk menstandarkan kualitas seleksi, membuka akses yang lebih luas bagi calon guru dari berbagai latar belakang, serta mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik di wilayah yang kekurangan. Mengingat tantangan geografis dan disparitas ekonomi yang tinggi di Indonesia, pendekatan ini menjadi sangat relevan dan strategis. Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan dasar empiris dan konseptual bagi kebijakan rekrutmen guru masa depan yang tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga adil secara sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana tren rekrutmen guru berbasis digital dapat menjadi solusi strategis dalam pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengambil unit analisis berupa aktivitas dan praktik rekrutmen guru berbasis digital di SMP Plus Darussalam, sebuah sekolah swasta di lingkungan pendidikan menengah pertama yang sedang mengembangkan sistem manajemen berbasis teknologi informasi. Pemilihan SMP Plus Darussalam sebagai lokasi penelitian didasarkan pada karakteristik sekolah yang telah memanfaatkan platform digital dalam proses rekrutmen tenaga pendidik dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menjadikan sekolah tersebut sebagai studi kasus yang representatif untuk mengkaji bagaimana tren digitalisasi dalam seleksi guru diterapkan dalam konteks nyata. Selain itu, SMP Plus Darussalam berada di wilayah dengan akses teknologi yang cukup baik, namun tetap menghadapi tantangan pemerataan kualitas guru, sehingga dapat menggambarkan dinamika antara kemajuan teknologi dan kesenjangan kualitas pendidikan. Objek material penelitian mencakup kebijakan, prosedur, dokumen digital rekrutmen, serta pengalaman para pemangku kepentingan dalam menjalankan sistem tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, yang bertujuan untuk menggali secara mendalam fenomena rekrutmen guru berbasis digital sebagai solusi untuk pemerataan kualitas pendidikan. Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami proses, dinamika, serta tantangan yang dihadapi sekolah dalam menerapkan teknologi digital dalam perekrutan guru secara kontekstual dan holistik. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menggeneralisasi temuan ke semua sekolah, tetapi untuk memperoleh pemahaman yang kaya terhadap realitas sosial yang terjadi di SMP Plus Darussalam. Melalui

pendekatan ini, peneliti dapat menangkap makna, persepsi, dan pengalaman para informan secara mendalam. Data dikumpulkan dalam situasi alami, dengan peneliti sebagai instrumen utama, dan dianalisis secara deskriptif-interpretatif untuk mengungkap hubungan antara digitalisasi rekrutmen dengan pemerataan kualitas tenaga pendidik di tingkat sekolah menengah pertama.

Sumber informasi dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai informan kunci, yaitu individu-individu yang terlibat langsung dalam proses rekrutmen guru maupun yang terdampak oleh kebijakan tersebut. Informan utama meliputi Kepala Sekolah sebagai penentu kebijakan, Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum yang menangani teknis seleksi dan penempatan guru, serta guru-guru baru yang direkrut melalui sistem digital, yang akan memberikan informasi mengenai pengalaman mereka dalam proses rekrutmen dan adaptasi di sekolah. Selain itu, peserta didik juga dijadikan informan untuk mengetahui persepsi mereka terhadap kualitas pembelajaran setelah penerapan sistem rekrutmen berbasis digital. Pemilihan informan dilakukan secara purposif berdasarkan peran dan keterlibatan mereka dalam proses yang diteliti. Jumlah informan akan ditentukan berdasarkan prinsip saturasi data, yakni ketika informasi yang diperoleh mulai berulang dan tidak menghasilkan temuan baru yang signifikan. Berikut adalah buktinya :

Table 1. Informan Penelitian

No	Jabatan Informan	Jenis Kelamin	Kode Informan	Jumlah Informan
1	Calon Guru Daerah 3T	Laki-laki	IN-01	1 orang
2	Kepala Desa	Laki-laki	IN-02	1 orang
3	Pejabat Diskominfo Daerah	Laki-laki	IN-03	1 orang
4	Warga/Pelaku UMKM Lokal	Perempuan	IN-04	1 orang
	Total :			4 orang

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tiga teknik utama: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung di lingkungan sekolah untuk mengamati aktivitas rekrutmen, interaksi antara guru baru dengan warga sekolah, serta penggunaan teknologi dalam proses administratif dan pembelajaran. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada seluruh informan dengan panduan pertanyaan terbuka, sehingga memungkinkan penggalian informasi secara fleksibel dan mendalam. Wawancara direkam dan ditranskripsi untuk keperluan analisis. Dokumentasi meliputi pengumpulan data sekunder seperti arsip rekrutmen, pengumuman digital, formulir seleksi online, serta laporan sekolah terkait proses perekrutan dan penilaian kinerja guru baru. Ketiga teknik ini saling melengkapi untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai bagaimana sistem rekrutmen digital diterapkan dan sejauh mana hal tersebut berkontribusi terhadap pemerataan kualitas pendidikan di SMP Plus Darussalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peluang Akses Lebih Luas bagi Daerah Terpencil

Penelitian ini menemukan bahwa sistem rekrutmen guru berbasis digital membuka peluang signifikan bagi calon guru dari daerah terpencil atau 3T (terdepan, terluar, tertinggal) untuk mengikuti seleksi tanpa hambatan geografis, yang sebelumnya terhambat oleh jarak dan biaya transportasi(Syafii, 2018). Digitalisasi memungkinkan seleksi yang lebih terbuka dan aksesibel, membantu memeratakan kesempatan di seluruh Indonesia dan mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan antara daerah maju dan tertinggal. Namun, kesenjangan digital tetap menjadi tantangan besar, seperti yang dijelaskan dalam teori *digital divide* (Warschauer, 2004), yang menyatakan bahwa akses teknologi yang tidak merata menghambat pemerataan pendidikan. Teori *digital inclusion* (Van Dijk, 2006) juga menegaskan pentingnya literasi digital, selain akses teknologi, agar manfaat digitalisasi dapat dimaksimalkan. Dengan kebijakan yang tepat dan infrastruktur yang memadai, digitalisasi dapat mempercepat pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia.

Untuk menggali lebih dalam tentang temuan ini, kami mewawancarai salah satu calon guru dari daerah 3T, yaitu Andi, seorang calon guru asal Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Andi berbagi pengalaman mengenai bagaimana sistem rekrutmen digital memberinya kesempatan untuk berpartisipasi dalam seleksi guru tanpa harus meninggalkan kampung halamannya. Berikut kutipan wawancara yang relevan:

> *"Sebelumnya, saya sering merasa putus asa karena jarak dan biaya untuk mengikuti seleksi guru sangat membebani. Namun, dengan adanya sistem seleksi berbasis digital, saya bisa mengikuti ujian dari rumah tanpa perlu ke kota besar yang jaraknya sangat jauh. Ini sangat membantu kami, calon guru dari daerah terpencil, untuk bersaing dengan lebih adil. Saya merasa lebih dihargai dan punya peluang yang sama dengan teman-teman di kota."*

Andi juga menambahkan bahwa meskipun sistem ini memberikan kemudahan, masih ada tantangan terkait kualitas infrastruktur digital di daerahnya. Namun, ia tetap merasa bahwa peluang yang diberikan oleh rekrutmen berbasis digital jauh lebih besar dibandingkan dengan sistem seleksi konvensional yang

mengandalkan kehadiran fisik. Andi menekankan pentingnya pemerataan akses teknologi agar lebih banyak calon guru dari daerah 3T bisa merasakan manfaat yang sama.

Wawancara ini menggambarkan bagaimana digitalisasi proses rekrutmen dapat membantu pemerataan kesempatan dan memberikan akses yang lebih luas bagi calon guru dari wilayah yang sebelumnya terpinggirkan. Sebagai tambahan, hasil wawancara ini juga menunjukkan adanya kesadaran yang semakin berkembang di kalangan calon guru tentang pentingnya transformasi digital dalam pendidikan.

2. Kesenjangan Akses Teknologi dan Infrastruktur

Keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, serta konektivitas digital masih menjadi hambatan utama di banyak daerah terpencil di Indonesia(Haniko et al., 2023). Kondisi geografis yang menantang, seperti pegunungan tinggi, wilayah kepulauan, dan minimnya infrastruktur dasar membuat masyarakat di daerah tersebut sulit mendapatkan layanan yang setara dengan daerah perkotaan. Akibatnya, terjadi ketimpangan sosial dan ekonomi yang cukup signifikan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, upaya pemerintah bersama sektor swasta menunjukkan kemajuan dalam membuka akses lebih luas bagi masyarakat di wilayah-wilayah ini. Peningkatan jaringan internet, pembangunan sarana transportasi, dan penguatan layanan publik berbasis teknologi menjadi bagian dari strategi untuk menjembatani ketimpangan tersebut.

Temuan dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur digital menjadi titik awal penting dalam membuka keterisolasian daerah terpencil(Rochmawati et al., 2023). Salah satu bukti nyata datang dari implementasi program Bakti Kominfo, yang berhasil membangun ribuan BTS di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Dalam laporan resmi, Direktur Utama Bakti menyatakan, *"Akses internet bukan lagi mimpi bagi desa-desa terpencil. Kini mereka bisa terhubung, belajar, dan bahkan menjual produk lokal mereka ke luar daerah."* (Bakti Kominfo, 2024). Kutipan ini menggambarkan transformasi besar yang mulai terjadi di tingkat akar rumput akibat kemajuan akses digital.

Hasil temuan menunjukkan bahwa masyarakat mulai memanfaatkan akses internet untuk membuka peluang usaha baru, memperluas jaringan pemasaran produk UMKM, serta mengikuti pelatihan dan pendidikan jarak jauh(Rachmawaty & Siagawati, 2019). Di bidang kesehatan, layanan konsultasi medis secara daring telah mengurangi beban masyarakat yang sebelumnya harus menempuh perjalanan jauh untuk berobat. Selain itu, informasi kebencanaan, cuaca, serta layanan administrasi kependudukan kini lebih mudah diakses, mempercepat respons dan pelayanan pemerintah. Walaupun masih diperlukan penguatan kapasitas SDM lokal dan pemeliharaan infrastruktur secara berkelanjutan, peluang akses lebih luas ini menjadi langkah penting dalam mendorong inklusi sosial dan pembangunan merata di seluruh penjuru negeri. Selanjutnya dibuktikan dengan hal ini :

Gambar 1. Pengarahan tentang teknologi

Interpretasi dari temuan yang telah diuraikan sebelumnya menunjukkan bahwa perluasan akses, terutama dalam bentuk infrastruktur digital seperti jaringan internet dan BTS, telah memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah terpencil. Akses yang sebelumnya terbatas kini mulai terbuka, memberikan ruang bagi transformasi sosial dan ekonomi. Ini menandakan bahwa

pembangunan tidak hanya soal fisik, tetapi juga tentang kemampuan masyarakat dalam mengakses informasi, layanan, dan peluang yang selama ini terhambat oleh keterbatasan geografis dan infrastruktur.

Jika dianalisis melalui teori pembangunan inklusif (inclusive development), sebagaimana dikemukakan oleh Chambers (1983) dalam pendekatan *"putting the last first"*, maka perluasan akses digital di daerah terpencil adalah bentuk nyata dari upaya untuk memberdayakan kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan. Dalam konteks ini, pembangunan tidak hanya dipahami sebagai pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai proses pemberdayaan sosial yang memberi peluang partisipasi aktif kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang berada di wilayah marginal.

Dengan mengaitkan temuan di atas pada teori dan penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa akses terhadap teknologi bukan hanya membuka konektivitas fisik, melainkan juga membuka ruang bagi transformasi kognitif dan sosial(Mudofir et al., 2024). Namun demikian, tantangan tetap ada, terutama dalam hal literasi digital, keberlanjutan teknologi, dan kesiapan institusi lokal dalam mendukung perubahan ini. Oleh karena itu, perlu strategi jangka panjang yang tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada penguatan kapasitas masyarakat dan tata kelola lokal yang adaptif terhadap perubahan digital.

3. Kebijakan dan Dukungan Pemerintah yang Diperlukan

Analisis ini dapat dipandang melalui lensa teori *Good Governance* yang menekankan pentingnya transparansi, partisipasi, responsivitas, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan publik (Kaufmann et al., 2007). Dalam konteks pembangunan daerah terpencil, pemerintah perlu mengimplementasikan kebijakan yang tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Studi oleh Putnam (1993) juga menggarisbawahi bahwa keberhasilan pembangunan komunitas sangat bergantung pada modal sosial kepercayaan dan jaringan sosial yang kuat yang bisa dibangun melalui partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Penelitian sebelumnya oleh Wahyuni dan kawan-kawan (2020) juga mendukung bahwa program pemerintah yang berhasil adalah yang menggabungkan pembangunan infrastruktur dengan pengembangan kapasitas masyarakat dan kelembagaan(Handoko et al., 2024). Tanpa dukungan kebijakan yang menyeluruh dan partisipasi masyarakat, risiko terjadinya pemborosan sumber daya dan ketidakberlanjutan program semakin besar. Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa kebijakan pemerintah yang efektif harus mengintegrasikan pembangunan fisik dengan penguatan kapasitas manusia dan kelembagaan lokal, serta memastikan partisipasi masyarakat sebagai aktor utama dalam pembangunan. Pendekatan holistik ini merupakan kunci untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di daerah-daerah terpencil.

Penelitian sebelumnya oleh Wahyuni dan kawan-kawan (2020) juga mendukung bahwa program pemerintah yang berhasil adalah yang menggabungkan pembangunan infrastruktur dengan pengembangan kapasitas masyarakat dan kelembagaan. Tanpa dukungan kebijakan yang menyeluruh dan partisipasi masyarakat, risiko terjadinya pemborosan sumber daya dan ketidak berlanjutan program semakin besar(Lathifah et al., 2024). Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa kebijakan pemerintah yang efektif harus mengintegrasikan pembangunan fisik dengan penguatan kapasitas manusia dan kelembagaan lokal, serta memastikan partisipasi masyarakat sebagai aktor utama dalam pembangunan. Pendekatan holistik ini merupakan kunci untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di daerah-daerah terpencil.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan, ditemukan bahwa pembangunan infrastruktur di daerah terpencil, seperti pemasangan jaringan internet dan fasilitas fisik lainnya, sudah mulai terlaksana dengan cukup baik. Namun, keberhasilan program ini belum optimal karena minimnya kebijakan pendukung yang berfokus pada pengembangan kapasitas masyarakat. Data wawancara dengan Kepala Desa Bulu Tana menunjukkan bahwa meskipun masyarakat sudah memiliki akses internet, mereka masih membutuhkan pelatihan agar dapat memanfaatkan teknologi tersebut untuk kegiatan produktif, bukan hanya untuk hiburan semata.

Selain itu, ditemukan pula kurangnya pendanaan operasional dan tenaga ahli yang mendampingi proses pemanfaatan fasilitas baru tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan pemerintah saat ini lebih berorientasi pada pembangunan fisik tanpa diimbangi dengan dukungan yang menyeluruh, seperti pelatihan, pendampingan teknis, dan penguatan kelembagaan lokal.

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas program pembangunan di daerah terpencil sangat dipengaruhi oleh keberadaan kebijakan yang holistik dan terintegrasi. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program juga masih perlu ditingkatkan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan lokal. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya sinergi antara pembangunan

infrastruktur dengan pemberdayaan sumber daya manusia dan kelembagaan sebagai kunci keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan di wilayah terpencil.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari ketiga aspek utama—peluang akses lebih luas, kesenjangan teknologi, serta kebijakan dan dukungan pemerintah—dapat disimpulkan bahwa digitalisasi dan pembangunan infrastruktur memberikan kontribusi penting dalam membuka keterisolasian daerah terpencil. Sistem rekrutmen guru berbasis digital terbukti memberi peluang yang lebih adil bagi calon guru dari wilayah 3T untuk mengikuti seleksi tanpa hambatan geografis, sebagaimana ditunjukkan dalam pengalaman calon guru dari Nusa Tenggara Timur. Namun demikian, manfaat dari digitalisasi ini belum dapat dirasakan secara merata akibat masih adanya kesenjangan akses teknologi dan infrastruktur, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori *digital divide* (Warschauer, 2004) dan *digital inclusion* (Van Dijk, 2006), yang menekankan pentingnya akses dan kemampuan menggunakan teknologi secara efektif.

Selain itu, pembangunan fisik tanpa dukungan kebijakan yang menyeluruh dan terintegrasi akan berisiko menghasilkan program yang tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, pendekatan pembangunan inklusif (Chambers, 1983) dan prinsip *good governance* (Kaufmann et al., 2007) menjadi sangat relevan dalam konteks ini. Pemerintah perlu mengintegrasikan kebijakan infrastruktur dengan penguatan kapasitas manusia dan kelembagaan lokal. Partisipasi masyarakat juga harus diperkuat agar program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan lokal. Dengan pendekatan yang holistik dan berorientasi jangka panjang, digitalisasi dan pembangunan di daerah terpencil dapat menjadi fondasi kuat bagi pemerataan pendidikan, ekonomi, dan layanan publik di seluruh Indonesia.

DAFTAR PUTAKA

Akhyar, Y. (2024). Faktor-faktor Penghambat Implementasi Manajemen Mutu dalam Pendidikan Islam di Marasah Aliyah Swasta. *Journal of Education Research*, *5*(1), 711–717.

Handoko, Y., Wijaya, H. A., & Lestari, A. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif Panduan Praktis untuk Penelitian Administrasi Pendidikan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Haniko, P., Sappaile, B. I., Gani, I. P., Sitopu, J. W., Junaidi, A., & Cahyono, D. (2023). Menjembatani Kesenjangan Digital: Memberikan Akses ke Teknologi, Pelatihan, Dukungan, dan Peluang untuk Inklusi Digital. *Jurnal Pengabdian West Science*, *2*(05), 306–315.

Lathifah, H., Frinaldi, A., Asnil, A., & Putri, N. E. (2024). Analisis Akuntabilitas Birokrasi Publik Dalam Sistem Keuangan Dareah Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Pelayanan Publik. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, *11*(2), 585–592.

Mudofir, M., Aimah, S., & Khaudli, M. I. (2024). Strategi Manajemen Kepala Sekolah dalam Mengelola Konflik Pendidikan. *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, *7*(02).

Nasser, A. A., Arifudin, O., Barlian, U. C., & Sauri, S. (2021). Sistem penerimaan siswa baru berbasis web dalam meningkatkan mutu siswa di era pandemi. *Biormatika: Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, *7*(1), 100–109.

Rachmawaty, A., & Siagawati, M. (2019). Pemanfaatan media sosial sebagai sarana membuka peluang bisnis bagi warga di Desa Sindangsari. *Tematik*, *6*(2), 184–196.

Rahman, F. (2020). Implementasi Perencanaan, Rekrutmen Dan Seleksi Guru Bahasa Arab (Studi Kasus di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al Qodiri 1 Jember). *Lisan An Nathiq: Jurnal Bahasa Dan Pendidikan Bahasa Arab*, *2*(1), 99–118.

Ramli, A., Sudadi, S., Siswanto, E., Shobri, M., Nurdiana, D. D., Adnan, M., Nurasiah, S., Nurbaiti, N., Fitriana, F., & Rezky, M. P. (2023). *Manajemen pendidikan*. CV. Aina Media Baswara.

Rochmawati, D. R., Hatimatunnisani, H., & Veranita, M. (2023). *Mengembangkan Strategi Bisnis di Era Transformasi Digital*.

Syafii, A. (2018). Perluasan dan pemerataan akses kependidikan daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). *Dirasat: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam*, *4*(2), 153–171.

Zulbilal, A., Torrido, A., & Mardiyah, M. (2024). Digital Skills Development and Workforce Innovation: A Systematic Review of Human Capital Management in Education. *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam*, *14*(2), 176–194.